

Penguatan Karakter Dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter)

Siti Musawwamah

*Program Studi Abwal Syakhshiyah Fakultas Syariah LAIN Madura
mamabtaufiq@yahoo.com*

Taufiqurrahman

*Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana LAIN Madura
wargamadura@gmail.com*

Abstrak:

Keberhasilan dan kegagalan peradaban suatu bangsa banyak ditentukan oleh karakter warga bangsanya. Oleh karenanya, pendidikan karakter menempati posisi tertinggi dalam prioritas pembangunan bangsa secara fisik material maupun secara psikis-spiritual. Lembaga pendidikan juga diberi amanat oleh negara untuk mendidik generasi bangsa dalam mewujudkan karakter warga bangsa yang unggul dan mapan. Termasuk di dalamnya lembaga pendidikan tingkat menengah di seluruh Indonesia. Untuk memperkokoh karakter warga bangsa, pemerintah menerbitkan regulasi berupa PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan tentang kesiapan penyelenggara sistem persekolahan dalam pelaksanaan PPK; gambaran tentang pelaksanaan PPK pada sistem persekolahan; problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan; dan langkah-langkah solutif penyelenggara pendidikan dalam memecahkan problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif dengan orientasi teoretik fenomenologis untuk mengungkap dan mendeskripsikan fokus-fokus kajian. Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 1 Pamekasan. Informan penelitian ini adalah guru, pimpinan sekolah, dan murid. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap catatan lapangan. Analisis ini dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data dilakukan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan 4 teknik, yaitu kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas.

(The success and the failure of a nation's civilization depends on the characteristics of its people's character. Therefore, character building sets in the highest position in the priority of the nation's development both material-physically and mental- spiritually. The nation also instructs the education institution to teach the students well in forming an excellent and proper citizen, including all senior high schools in Indonesia. In forming the citizen's character, the government publishes the regulation of PERPRES no. 87 year 2017 about the strengthening of character building or PPK. The purpose of this research is to reveal, identify and describe the readiness of the organizer of schooling system in implementing PPK; the description of the PPK implementation in schooling system; the problems in implementing PPK in schooling system; and the solutions for the education organizer in solving the problems of PPK implementation in schooling system. The research uses the qualitative method and approach with theoretic phenomenological orientation to reveal and describe the research focuses. The location of this research is at SMAN 1 Pamekasan. The sources of data are the teachers, the principle, and the students. The data analysis to the field notes is done qualitatively. This analysis is done in the process of data collecting and afterward. The checking of data is done with four techniques; they are credibility, dependability, transferability and confirm ability.)

Kata Kunci:

Karakter, Pendidikan, Sistem Persekolahan, PPK.

Pendahuluan

Awal September 2017 yang baru lalu menjadi tonggak bersejarah dan momentum penting khususnya bagi lembaga pendidikan sistem persekolahan karena pada waktu itu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diterbitkan. Penerbitan PERPRES tentang PPK itu di samping merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, juga menandai suatu pengakuan betapa PPK akan mengubah arah, orientasi, dan tata kelola sistem persekolahan pada masa-masa mendatang. Sasaran utama penguatan karakter peserta didik itu dilakukan melalui harmonisasi (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik) sesuai falsafah hidup Pancasila dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan warga masyarakat yang merupakan bagian dari pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).¹

Terbitnya PERPRES itu mengakhiri perdebatan sengit dan kegaduhan nasional tentang ketentuan 5 hari sekolah yang wajib dilaksanakan oleh semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebab, secara eksplisit dinyatakan oleh PERPRES itu bahwa ketentuan hari sekolah diatur secara leluasa dalam pelaksanaan PPK, yaitu lima hari atau enam hari sekolah dalam seminggu. Untuk menentukan opsi mana yang tepat, didasarkan pada prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, pelaksana satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah. Penentuan hari sekolah tersebut perlu mempertimbangkan (a) kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, (b) ketersediaan sarana dan prasarana, serta (c) kearifan lokal.²

Atas dasar PERPRES itu, perdebatan bukan lagi pada perlu lima hari sekolah atau tidak, melainkan bagaimana satuan pendidikan dapat memaksimalkan hari sekolah untuk mencapai tujuan penguatan karakter siswa. Dalam konteks ini hari sekolah bukan merupakan tujuan dari penyelenggaraan PPK, melainkan sebagai sarana untuk mencapai target PPK yaitu mewujudkan kompetensi siswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.³

Studi tentang penguatan karakter dalam pendidikan sistem persekolahan, sebagai implementasi PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, menarik, penting, dan sekaligus relevan dilakukan. Mengapa? Sekurang-kurangnya terdapat 7 argumentasi yang mendasarinya. *Pertama*, Amanat Undang-Undang dan Kebijakan Nasional Pendidikan, meliputi: UU Sisdiknas, Nawacita, Trisakti, RPJMN 2015-2019, Amanat Presiden RI, Kebijakan Kemdikbud. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengamanatkan kepada penyelenggaran negara/pemerintahan untuk merevitalisasi fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Nawacita, sebagai agenda/janji kampanye Presiden juga menegaskan agar Presiden melaksanakan penguatan revolusi karakter bangsa melalui pendidikan budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental.⁴ Demikian pula disebutkan dalam Trisakti bahwa pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan generasi yang berkepribadian dalam kebudayaan.⁵ Dalam RPJMN 2015-2019, Kabinet Kerja menggariskan dalam bidang pendidikan bahwa penguatan

¹ PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang *Penguatan Pendidikan Karakter* (PPK), Pasal 1 (Lembaran Negara RI tahun 2017 Nomor 195).

² *Ibid.*, Pasal 9.

³ *Ibid.*, Pasal 3.

⁴ Agenda Butir 8 Nawacita Pemerintahan Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019.

⁵ Trisakti, sebagai agenda pemerintahan Jokowi-JK pada Pemerintahan Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019.

pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran.”⁶ Amanat Presiden untuk memperkuat pendidikan karakter warga-bangsa itu dalam rangka penyiapan Generasi Emas 2045 yang bertaqwa, nasionalis, tangguh, mandiri, dan memiliki keunggulan bersaing secara global. Termasuk di dalamnya Kebijakan Kemdikbud untuk memperkuat karakter siswa melalui kegiatan pendidikan formal, nonformal, dan informal.⁷

Kedua, Fokus pada Penguatan Pendidikan Karakter. Penyelenggaraan pendidikan karakter bukan merupakan produk baru, tidak diposisikan sebagai matapelajaran tersendiri, dan bukan rumusan kurikulum baru tetapi merupakan penguatan atau fokus dari proses pembelajaran dan sebagai poros/ruh/jiwa dalam praksis pendidikan; *Ketiga*, Penguatan Peran-Peran dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan Masyarakat PPK mendorong penguatan ekosistem pendidikan (Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan Masyarakat);

Keempat, Praktik-Praktik Baik dalam ekosistem persekolahan. Akumulasi kekayaan pengalaman dan praktik-praktik baik pendidikan dalam sistem persekolahan yang bersumber dari Kepala Sekolah dan Guru didayagunakan secara efektif; *Kelima*, Keteladanan. Keteladanan dan perilaku baik didesiminasikan oleh Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua dalam aktivitas keseharian; *Keenam*, Konsep Pembelajaran Dialogis. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilaksanakan berbasis Kelas, PPK Berbasis Budaya Sekolah, dan PPK Berbasis Partisipasi Masyarakat; *Ketujuh*, semua kegiatan PPK terintegrasi dengan seluruh aktivitas KBM di sekolah.

Upaya untuk mewujudkan penguatan pendidikan karakter itu dilatarbelakangi oleh pemikiran antisipatif dari perkembangan yang sangat cepat atas dinamika kehidupan dunia dalam skala makro, skala mikro, skala nasional, dan skala regional

Dalam bidang non-pendidikan, tahun 2015 merupakan tahun dimulai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), berlaku berbagai peraturan perundang-undangan baru, dan dimulai kebijakan baru pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, tahun 2015 menjadi tonggak penting urusan pemerintahan dan kemasyarakatan Indonesia. Salah satunya, urusan pendidikan nasional Indonesia. Sendi-sendi pendidikan nasional Indonesia perlu ditata kembali atau ditransformasikan sehingga pendidikan nasional Indonesia semakin sanggup memberi kontribusi berarti bagi kiprah dan kemajuan negara dalam abad ke-21 yang sudah mengalami banyak perubahan mendasar secara paradigmatis. Di samping itu, penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia itu diarahkan untuk merespon dan memberi jawaban atas berbagai tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru sebagai konsekuensi beragam kondisi mutakhir. Hal ini menunjukkan bahwa penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia merupakan “tugas sejarah” (*imperative duties*) yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan tiga alasan berikut ini:

Pertama, kekuatan bangsa-bangsa di dunia yang sekarang mengalami kemajuan sangat berarti, misalnya Jepang, Singapura, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Finlandia, telah disangga oleh pendidikan yang bermutu dan maju. Dalam berbagai pemeringkatan pendidikan di arus global, misalnya, Learning Curve, TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*), dan PISA (*Programme for International Student Assessment*), negara-negara tersebut sering menduduki peringkat atas. *Kedua*, berbagai studi internasional dan nasional tentang pendidikan Indonesia memberikan justifikasi betapa mendesaknya transformasi pendidikan nasional Indonesia sekarang. Laporan-laporan Bank Dunia, UNDP, dan UNESCO tentang pendidikan Indonesia merekomendasikan transformasi secara terarah pada pendidikan nasional Indonesia supaya Indonesia mampu tumbuh

⁶ Program kerja pada Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

⁷ Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Jakarta: Setjen Kemdikbud, 2017), 1-7.

dan berkembang dengan baik, terhindar dari jebakan-jebakan yang membawa aneka kemerosotan pada satu sisi dan pada sisi lain mampu memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka. *Ketiga*, berbagai fakta dan bukti kinerja pendidikan nasional yang telah dipublikasikan oleh berbagai pihak mengamanatkan betapa mendesaknya penataan kembali maupun transformasi pendidikan nasional Indonesia secara komprehensif dan sistemik. Penataan kembali maupun transformasi pendidikan nasional tersebut dapat dimulai dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam pendidikan nasional berdampingan dengan intelektualitas yang tercermin dalam kompetensi.⁸

Melalui pendidikan karakter yang kuat dan tangguh beserta kompetensi yang tinggi, berbagai kebutuhan, tantangan, dan tuntutan baru dapat dipenuhi dan diatasi. Oleh karena itu, selain pengembangan intelektualitas, pengembangan karakter peserta didik sangatlah penting atau utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dikatakan demikian karena pada dasarnya pendidikan bertujuan mengembangkan potensi-potensi intelektual dan karakter peserta didik. Hal ini dilandasi oleh berbagai pemikiran tentang pendidikan beserta beragam peraturan perundang-undangan yang memayunginya.

Usaha penyeimbangan pendidikan karakter dengan pembentukan kompetensi senantiasa harus dilakukan demi kepentingan masa depan bangsa Indonesia, bahkan sejak sekarang perlu dilakukan pemusatan (*centering*) pendidikan karakter dalam penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia. Kesadaran sekaligus usaha pemusatan pendidikan karakter di jantung pendidikan nasional itu semakin kuat ketika pada tahun 2010 pemerintah Indonesia mencanangkan sekaligus melaksanakan kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter berlandaskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Bangsa. Hal tersebut perlu dilanjutkan, dioptimalkan, diperdalam, dan bahkan diperluas sehingga diperlukan penguatan pendidikan karakter bangsa. Untuk itu, sejak sekarang perlu dilaksanakan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan mengindahkan asas keberlanjutan dan kesinambungan.

Gerakan PPK menempati kedudukan fundamental dan strategis pada saat pemerintah mencanangkan revolusi karakter bangsa sebagaimana tertuang dalam Nawacita (Nawacita butir 8), yaitu menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan menerbitkan RPJMN 2014–2019 berlandaskan Nawacita. Sebab itu, Gerakan PPK dapat dimaknakan sebagai pengejawantahan Gerakan Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita. Sebagai pengejawantahan Gerakan Nasional Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita, Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, Gerakan PPK perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang telah berlangsung sampai sekarang. Dalam hubungan ini pengintegrasian dapat berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas); pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Paparan latar belakang itu menjadi dasar kegiatan penelitian ini akan dilakukan dengan tema *Penguatan Karakter dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter)*. Untuk itu telah dilakukan studi pendahuluan di lokasi penelitian, diantaranya ditemukan bahwa sejak pemindahan kewenangan dan tata kelola Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan SMAN/SMKN di Kabupaten Pamekasan telah memulai gerakan PPK pada awal Juli

⁸ UNESCO, *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* (Paris: UNESCO Publishing, 2015), 17.

2017, yaitu tahun pelajaran semester Gasal. Sedangkan SMAN/SMKN pada 3 kabupaten lainnya di wilayah Madura belum melaksanakan. Menariknya, SMA Negeri 1 dikukuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai sekolah rujukan (*pilot project*) atau model pelaksanaan gerakan PPK. Beragam problem ditemukan dalam pelaksanaan dan tata kelola pelaksanaan PPK, mulai dari penyamaan persepsi, langkah, perubahan *mindset* dan aturan penunjangnya, hingga keterpenuhan/ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Begitu beragamnya temuan-awal problem pelaksanaan PPK itu, sebagian orangtua/wali dan guru meminta penundaan keberlakuannya hingga perangkat standar minimal pelaksanaannya dapat terpenuhi. Misalnya, ketersediaan sarana ibadah, cafetaria, kerjasama dengan lembaga pendidikan mitra, *softskill* pengelola program dan kegiatan pembelajaran, dan sejenisnya.

Berdasarkan deskripsi pada konteks penelitian tersebut, penelitian ini menyajikan fokus penelitian: (1) Bagaimana kesiapan penyelenggara sistem persekolahan dalam pelaksanaan PPK di SMA Negeri 1 Pamekasan?; (2) Bagaimana gambaran tentang pelaksanaan PPK pada sistem persekolahan di SMA Negeri 1 Pamekasan?; (3) Apa saja problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan di SMA Negeri 1 Pamekasan?; (4) Bagaimana langkah-langkah solutif penyelenggara pendidikan dalam memecahkan problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan di SMA Negeri 1 Pamekasan?

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengungkap kesiapan penyelenggara sistem persekolahan dalam pelaksanaan PPK di SMA Negeri di Kabupaten Pamekasan; (2) mengeksplorasi pelaksanaan PPK pada sistem persekolahan di SMA Negeri di Kabupaten Pamekasan; (3) mengidentifikasi beragam problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan di SMA Negeri di Kabupaten Pamekasan, dan; (4) mendeskripsikan langkah-langkah solutif penyelenggara pendidikan dalam memecahkan problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan di SMA Negeri di Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini memiliki signifikansi sebagai berikut: (1) Mengembangkan platforma pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan, dengan memperhatikan kondisi keberagaman satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia; (2) Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21; (3) Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan pondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik); (4) Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter; (5) Membangun jejaring pelibatan publik sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah; dan, (6) Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Penelitian ini memiliki ruang lingkup: (1) eksplorasi atas kesiapan penyelenggara sistem persekolahan jenjang pendidikan menengah dalam pelaksanaan PPK; (2) pemetaan atas kegiatan penguatan karakter dalam pendidikan sistem persekolahan; (3) evaluasi atas pelaksanaan PPK, dan (4) subjek penelitian meliputi para siswa, guru, dan komite sekolah pada SMA Negeri 1 Pamekasan yang sejak Semester Gasal, Juli 2017, telah memulai pelaksanaan PPK.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap dan mendeskripsikan fokus kajian melalui pengamatan yang mendalam pada situasi yang wajar dan alamiah.⁹ Dengan pendekatan itu akan diperoleh gambaran yang integral dan holistik tentang Penguatan Karakter dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter). Melalui pendekatan kualitatif tersebut dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensif atas makna substantif dari perilaku subjek penelitian yang berkaitan erat dengan fokus penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini, digunakan orientasi teoretik fenomenologis sebagai landasan berfikir sehingga dapat menemukan dan memaknai gejala, perilaku, maupun peristiwa sosial yang tampak dengan tetap mendasarkan diri pada pemahaman subjek penelitian dari persepektif mereka dan tidak terikat oleh isu atau pandangan teoretik tertentu

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pamekasan, yaitu institusi pendidikan tingkat menengah atas dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terletak di kabupaten Pamekasan. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan kesesuaian topik dan fokus penelitian, di samping pula karena kemenarikannya dan keunikannya. Aspek kemenarikannya antara lain dapat dilihat dari kinerja yang mengarah pada linieritas atau kesebandingan antara ketersediaan alokasi waktu minimum dan implementasi regulasi yang menaunginya; Sedangkan keunikannya antara lain dapat dilihat pada kemantapannya dalam melaksanakan Penguatan Karakter dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter) di saat SMA Negeri serupa di wilayah Madura belum melaksanakannya dengan beragam alasan.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data tentang melaksanakan Penguatan Karakter dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter) pada siswa SMA Negeri 1 Pamekasan. Jenis data dalam penelitian ini meliputi rekaman hasil wawancara, catatan lapangan hasil pengamatan, dokumen-dokumen resmi, fotografis, arsip, dan data statistik yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sejalan dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka penentuan “sampel” dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.¹¹ Penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut direalisasikan menurut prinsip *funnel design*, yakni dengan cara menghimpun data seluas-luasnya dengan teknik *snowball sampling* untuk kemudian dilakukan penyempitan dan penajaman sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh kedalaman dan keabsahan data, peneliti mencari dan menyeleksi informan guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹² Tujuannya, bukan untuk melakukan rampatan (generalisasi) atau representasi dari populasi penelitian melainkan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang didasarkan pada relevansi dan kedalaman kajian.¹³ Kendatipun begitu, pemilihan sampel tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kehendak subjektif peneliti tetapi lebih didasarkan pada tema-tema konseptual yang muncul di lapangan. Dalam penelitian ini pemilihan sampel internal didasarkan atas adanya gagasan umum

⁹ Bogdan, R.C. & Biklen, S.K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1992), 21; Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S., *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 1994), 11.

¹⁰ Lincoln, Y.S. & Guba, E.G., *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications, Inc., 1995), 15; Patton, M.Q., *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills, California: Sage Publications, Inc., 1994), 14.

¹¹ Bogdan & Biklen, 21.

¹² Lofland, J. & lofland, L.H. *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (Belmont, C.A.: Wadsworth Publishing, Co., 1994)

¹³ Soetopo, H.B. *Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Makalah Kuliah Umum Tidak dipublikasikan (Malang: Pusat Penelitian IKIP MALANG, 4 Februari, 1997), 3.

tentang tema yang diteliti, dengan siapa peneliti melakukan wawancara, kapan peneliti melakukan observasi, dan dokumen apa saja yang dikaji. Dengan kata lain, pengambilan sampel internal bertujuan untuk memfokuskan tema kajian dan mempertajam fokus penelitian.¹⁴

Secara teknis, penentuan informan dalam penelitian ini merujuk pada pendapat yang menyatakan bahwa: (1) informan telah cukup lama tinggal dan “menyatu” dalam seting penelitian, (2) informan masih aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan seting penelitian, (3) informan memiliki kesempatan yang leluasa dan menyatakan kesediaan untuk dimintai informasi, (4) informan beritikad untuk memberikan informasi yang sebenarnya, dan (5) informan dapat diperlakukan sebagai “guru baru” bagi peneliti. Para informan dalam penelitian ini adalah sejumlah guru dan siswa SMA Negeri 1 Pamekasan.¹⁵

Untuk memperoleh data yang holistik dan integratif tentang fokus penelitian dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data ini merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif.¹⁶ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstandar (*unstandardized interview*). Wawancara ini dilakukan secara *open-ended* berdasarkan pedoman atau daftar pertanyaan yang disusun tidak secara ketat atau lentur.¹⁷ Wawancara demikian kemudian dikembangkan dalam tiga teknik, yaitu *unstructured interview*, *somewhat interview*, dan *casual interview*.

Informan yang ditetapkan dalam wawancara ini merujuk pada pendapat Lincoln & Guba, yaitu dipilih di antara orang-orang yang dipandang memiliki informasi dan pengetahuan yang memadai dan dekat dengan seting yang menjadi fokus penelitian. Di samping itu, mereka memiliki pemahaman atas situasi lapangan serta punya status yang jelas.¹⁸

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memeriksa dan melengkapi rekaman hasil wawancara yang dilakukan dengan informan. Langkah ini dilakukan karena ada kemungkinan bahwa informasi yang diperoleh belum menyeluruh (holistik dan integratif), belum dapat menggambarkan konteks dan seting penelitian atau terjadi kemencengan informasi.¹⁹ Penggunaan teknik observasi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) *observasi deskriptif* (perekaman dan analisis data awal, kemudian dilakukan penyempitan [pemusatan] pengumpulan data yang diperlukan); (2) *observasi terfokus* (untuk menetapkan kategori-kategori tema kajian, analisis data dan observasi secara lebih mendalam, untuk selanjutnya dilakukan penyempitan kembali); dan (3) *observasi selektif* (mengidentifikasi dan mencari perbedaan-perbedaan di antara kategori-kategori dari tema atau fokus kajian serta hal-hal lain yang berkaitan).²⁰

Dalam penelitian ini juga digunakan studi dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Menurut Sonhadji, studi Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. Sumber noninsani ini terdiri dari dokumen dan rekaman.²¹ Menurut Lincoln & Guba, rekaman adalah setiap tulisan atau pernyataan yang disiapkan oleh/atau untuk individu maupun organisasi dengan tujuan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau untuk memenuhi akuntabilitas.²²

¹⁴ Bogdan & Biklen, 23.

¹⁵ Spradley, 24.

¹⁶ Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 34.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1999), 44.

¹⁸ Lincoln & Guba, 45.

¹⁹ Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), 45.

²⁰ Spradley, 99.

²¹ Sonhadji K.H., A., Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, dalam Imron Arifin (Ed.). *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press, 1994), 54.

²² Lincoln & Guba, 51.

Analisis data dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian data (yakni menelaah, menata, dan mengklasifikasikan data menjadi satuan-satuan yang mudah dikelola), sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting yang bermakna, dan penetapan hasil analisis sebagai bahan penarikan teori substantif atau penyusunan inferensi.²³ Data dalam penelitian ini berupa deskripsi rinci tentang situasi, peristiwa atau kejadian sosial, interaksi individu dan perilakunya, kutipan pernyataan dari informan atau responden tentang perspektif, sikap, pengalaman dan keyakinan, serta petikan-petikan isi dokumen, surat, arsip, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁴ Deskripsi rinci tersebut dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat jenis analisis, yaitu (1) analisis teoretik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen. Kegiatan analisis tersebut dilakukan secara komplementer, yakni saling melengkapi antara analisis yang satu dengan lainnya. Data yang berasal dari rekaman hasil wawancara, catatan lapangan hasil pengamatan (observasi), dan dokumen dideskripsikan dengan menggunakan tiga jenis reduksi, yaitu: (1) *reduksi fenomenologis* (untuk melakukan tindakan pemurnian atas data yang berhasil dikumpulkan sehingga diperoleh fenomena nyata dan sebenarnya); (2) *reduksi eiditis* (untuk mendeskripsikan peristiwa sosial dalam setting penelitian, mengidentifikasi unsur-unsur yang konsisten, dan mengkategorikan unsur-unsur tersebut sehingga diperoleh data murni berupa substansi hakikat peristiwa sosial pada subjek penelitian); dan (3) *reduksi transendental* (untuk melakukan analisis konseptual atas temuan penelitian secara teoretik, untuk selanjutnya dilakukan pemaknaan sehingga diperoleh hakikat fenomena yang tepat secara konseptual maupun teoretik).²⁵

Terhadap temuan-temuan data hasil penelitian dilakukan pengecekan atas keabsahan data dan interpretasi data sehingga diperoleh nilai-nilai kebenaran (*truth worthiness*). Untuk keperluan itu dilakukan uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data.²⁶ Pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil rekaman data yang diperoleh peneliti telah sesuai dengan kondisi yang ada dan terjadi sebenarnya.²⁷ Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memenuhi kriteria bahwa informasi dan temuan hasil penelitian mengandung nilai kebenaran *emic*.²⁸

Uji kredibilitas data menurut Guba & Lincoln dan Patton dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dari tujuh teknik yang tersedia, digunakan lima teknik di antaranya, yaitu (1) observasi secara mendalam atau terus-menerus, (2) triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data, (3) pengecekan anggota, (4) diskusi oleh teman sejawat, dan (5) pelacakan kesesuaian hasil (kecukupan referensial). Sedangkan dua teknik lainnya—yaitu perpanjangan waktu penelitian dan analisis kasus negatif—tidak digunakan dalam uji kredibilitas data karena kelima teknik tersebut dipandang telah cukup memadai untuk menetapkan kredibilitas data.²⁹

²³ Miles, M.B & Huberman, A.M., *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication, 1996), 65; Bogdan & Biklen, 66.

²⁴ Patton, 27.

²⁵ Dimiyati, 65.

²⁶ Lincoln & Guba, 95; Moleong, 99.

²⁷ Nasution, 66.

²⁸ Soegianto, S., *Desain dalam Penelitian Kualitatif*. Makalah Disampaikan pada Penataran Dosen IKIP Surabaya. Makalah Tidak dipublikasikan. (Surabaya: Pusat Penelitian IKIP Surabaya, 20 Januari, 1999), 5.

²⁹ Guba & Lincoln, 55; Patton, 76.

Uji dependabilitas digunakan untuk memeriksa keabsahan proses penelitian yang dan memperbaiki kekurangtepatan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh *independent/external auditor*. Sedangkan audit konfirmabilitas dilakukan untuk menetapkan objektivitas data dan temuan hasil penelitian sesuai dengan kondisi aktual yang benar-benar terjadi di lapangan.

Jika dalam audit dependabilitas dimaksudkan untuk menilai proses kegiatan penelitian, maka audit konfirmabilitas bertujuan untuk menilai *hasil* penelitian. Keduanya dilakukan secara simultan. Dalam audit konfirmabilitas inilah dilakukan penilaian atas keterkaitan antara informasi, data, dan interpretasi yang tersusun dalam organisasi pelaporan hasil penelitian yang didukung oleh materi kajian maupun yang digunakan dalam *audit trail*.

Hasil dan Pembahasan

Program Madrasah Adiwiyata

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas/SMA Negeri 1 Pamekasan, institusi pendidikan tingkat menengah yang tergolong *favorite* menurut Pemerintah Kabupaten/Provinsi maupun pengakuan warga masyarakat berkat beragam prestasi akademik dan nonakademiknya yang berhasil diraih mulai dari level lokal, regional, nasional, maupun internaional yang diikutinya. Didirikan pada 13 November 1951, SMAN yang berlokasi di Jalan Pramuka Pamekasan ini memiliki 968 siswa yang terbagi dalam 3 jenjang kelas (yaitu kelas X, XI, dan XII) masing-masing dalam 2 jurusan, yakni jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sebagaimana terungkap pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Jumlah Siswa SMAN 1 Pamekasan				
Kelas/Jurusan	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jumlah
IPA	252	252	256	760
IPS	72	72	64	208
Jumlah	324	324	320	968

Proporsi masing-masing kelas diisi oleh sejumlah siswa, yaitu, Kelas X dan XI terbagi dalam jurusan IPA yang menempati 7 ruang kelas, sedangkan jurusan IPS menempati 2 ruang kelas yang masing-masing kelas diisi atau berkapasitas 36 siswa. Pada Kelas XII, jurusan IPA menempati 8 ruang kelas, sedangkan jurusan IPS menempati 8 ruang kelas, masing-masing kelas berkapasitas atasu diisi oleh 32 siswa.

Secara kelembagaan, SMAN 1 Pamekasan merumuskan visi dan misi institusinya berikut ini. **VISI:** Terwujudnya Insan yang cerdas dan berakhlak mulia serta mampu menjawab tantangan zaman. **MISI:** 1. Meningkatkan kompetensi dasar peserta didik sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional, regional dan internasional; 2. Meningkatkan relevansi kemampuan peserta didik dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; 3. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara utuh sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya; 4. Meningkatkan kemampuan daya pikir, daya kreatif, dan pengalaman serta sikap dan nilai-nilai berdasarkan standar yang bersifat regional, nasional dan global.

Seiring perjalanan waktu dan perkembangan zaman, SMAN 1 Pamekasan menorehkan prestasi dan keunggulannya yang relatif membanggakan. Di antaranya, dikukuhkan statusnya sebagai: (1) Sekolah Kategori Mandiri Tahun 2007; (2) Sekolah Standart Nasional Tahun 2008; dan (3) Sekolah RSBI tahun 2009 – 2014. SMA Negeri 1 Pamekasan di usianya yang sudah mencapai 67 tahun, berbagai prestasi akademik dan nonakademik pada tingkat Kabupaten hingga tingkat Internasional

telah diraih, yakni Prestasi Internasional Olimpiade Fisika, mendapat Medali Emas, tahun 2006 dan 2010; Prestasi Internasional Olimpiade Fisika, mendapat Medali Emas, tahun 2010;

Dalam pelaksanaan kegiatan institusionalnya, SMAN 1 Pamekasan melandaskan diri pada program kerja kegiatan yang dirumuskan dan ditetapkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana terungkap berikut ini. Pada Program Kerja Tahun: 2014-2015 (*Complete and Orderly Administration*), SMAN 1 Pamekasan melakukan kegiatan berupa 1) Peninjauan dan penyesuaian kembali KTSP, (kelengkapan dokumen Buku I, Buku II, dan Buku III), 2) Melengkapi bukti fisik 165 komponen dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 3) Mengupayakan kelengkapan administrasi pembelajaran dari semua guru, 4) Awal tahun ajaran guru wajib menyerahkan administrasi pembelajaran kepada kepala sekolah, 5) Penataan *file* administrasi sekolah sesuai bidang masing-masing (Keuangan, Kepegawaian, Humas, Kesiswaan, Sarana Prasarana), 6) Melengkapi administrasi sekolah yang didinginkan (Kep. Sek. Kurikulum, Kesiswaan, Perpustakaan, BK, Kelas-kelas), 7) Pendataan/Inventarisasi sarana prasarana sekolah, 8) Pembuatan kata kata mutiara/ motivasi yang didinginkan, 9) Mengusahakan tertib aturan dan administrasi, semua bentuk kegiatan ada proposal dan laporan pertanggung jawaban secara tertulis, 10) Tertib dan lengkap notulensi (Analen, notulen harian, notulen rapat guru, notulen rapat2 masing masing bidang), 11) Menciptakan dan mengusahakan tertib dan disiplin dalam mengikuti seluruh kegiatan sekolah, 12) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, 13) Pembangunan RKB 2 lantai dan Renovasi penambahan beberapa ruangan yang masih kurang.

Pada Tahun 2015-2016, Program Kerja yang dilakukan oleh SMAN 1 Pamekasan yaitu (*Implementing Clean and on Time By Discipline*) terdiri dari: 1) Mengusahakan semua jenis kegiatan sekolah dimulai tepat waktu, 2) Mendisiplinkan siswa dalam upaya menurunkan tingkat keterlambatan, 3) Menerapkan aturan sekolah secara konsekuen, 4) Menciptakan kerindangan, penghijauan, penataan dan keindahan lingkungan sekolah, 5) Memilah sampah organik dan anorganik dan mengolahnya (Pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat), 6) Mengusahakan semua jenis kegiatan sekolah dimulai tepat waktu, 7) Meningkatkan kemampuan siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab, 8) Meningkatkan kemampuan siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab, 9) Mengusahakan peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa, 10) Mengusahakan TOEFL siswa (kelas x minimal 400, kelas XI minimal 450, kelas XII minimal 500), 11) Meningkatkan profesionalisme semua unsur sekolah (guru, tenaga tata usaha, tenaga lab, pustakawan, tenaga pelaksana dan keamanan

Pada Program Kerja Tahun 2017-2018 (*Greeting and Courtesies as a Form of Brotherhood*), terdiri dari: 1) Mengusahakan selalu memberi salam kepada siapa saja yang ditemui, 2) Saling memberikan rasa hormat kepada siapa saja yang ditemui, 3) Menghilangkan bentuk-bentuk kegiatan yang bertentangan dengan persaudaraan sejati, 4) Saling membantu dan mendukung jika ada teman yang mengalami kesulitan dalam hal pergaulan maupun ketertinggalan dalam belajar, 5) Pelaksanaan kegiatan sekolah (ekstra kurikuler) yang bisa membaaur dari seluruh kelas, 6) Mengusahakan budaya kakak kelas bisa menjadi pengayom dan panutan yang baik bagi adik kelasnya, 7) Mengusahakan setiap angkatan bisa lulus dan naik kelas 100% dengan pencapaian nilai minimal SKM, 8) Mengusahakan siswa yang nyaman dan santun, 9) Mengusahakan lulusan diterima di Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi minimal 70%, 10) Menciptakan budaya sekolah yang dicintai dan disegani oleh masyarakat.

Pada tahun 2018-2019 (*Honest and No Falsehood Among Us*), SMAN 1 Pamekasan melakukan kegiatan yaitu: 1) Mengupayakan budaya transparansi dalam melaksanakan tugas, 2) Mengusahakan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, 3) Bersih dari kasus narkoba, pemalakan, saweran, sajen, keme, tack, 4) Mengusahakan pembelajaran yang bersih dari sontek menyontek, 5) Berani terbuka jika ada permasalahan yang dihadapi, 6) Mengusahakan budaya diskusi mencari solusi bersama untuk kebaikan bersama, 7) Menghilangkan rasa apriori dan curiga, 8)

Mengusahakan semakin mempecahkan budaya *share mission* sesuai bidang tugas masing-masing, 9) Mengusahakan pembelajaran yang bermutu tinggi yang menyenangkan, 10) Menjaga nama baik almamater.

Secara kelembagaan, untuk mengefektifkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan, SMAN 1 Pamekasan dikelola menurut struktur organisasional berikut ini.

Gambar 1
Struktur Organisasi Tata Usaha SMA Negeri 1 Pamekasan.



Gambar 2
Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Pamekasan.



Sejak semester Gasal 2017, SMAN 1 mulai menerapkan kurikulum 2013, yang biasa disebut dengan K-13. Sebelumnya, sebagaimana umumnya SMA lainnya, kurikulum pendidikannya menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penerapan K-13 itu diorientasikan pada program Penguatan Pendidikan Karakter/PPK sebagaimana amanat PERPRES Nomor 87 Tahun 2017. Keputusan penerapan PPK itu diambil di saat sejumlah SMAN dalam wilayah/Kabupaten di Madura belum ada kemantapan (keberanian?) menerapkannya. Bahkan hingga semester genap tahun 2018 saat penelitian ini dilakukan.

Kemantapan pimpinan SMAN 1 untuk sesegera mungkin menerapkan program PPK itu, selain didasari oleh amanat peraturan perundang-undangan, juga karena institusi pendidikan ini dikukuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Sekolah Perintis dalam penerapan Gerakan Nasional Penguatan Pendidikan Karakter (GN-PPK) dan menjadi model penyelenggaraan sistem pendidikan menengah dalam wilayah provinsi Jawa Timur. Amanat demikian dipandang tepat diberikan kepada SMAN 1 oleh pemerintah provinsi Jawa Timur karena institusi pendidikan itu telah dikenal keunggulan-keunggulannya.

Berdasarkan catatan lapangan yang dikumpulkan melalui teknik wawancara kepada tenaga pendidik dapat diungkapkan kesiapan institusioanl SMAN 1 dalam pelaksanaan program PPK, penyelenggara pendidikan pada SMAN 1 Pamekasan telah mantap dalam menjalankan program PPK bagi para siswanya.

Kesiapan SMAN 1 dalam pelaksanaan program PPK sesungguhnya telah dimulai sejak sekolah ini bersedia menerima amanat sebagai sekolah perintis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan sebelum program PPK dilaksanakan oleh Sekolah. Hal itu dimaksudkan agar tenaga pendidik telah siap saat akan dimulai program PPK sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaan PPK.

Dalam pelaksanaan program PPK di SMAN 1 Pamekasan, di bawah koordinasi kepala sekolah guru-guru merealisasikannya dalam proses/kegiatan yang terintegrasi dengan masing-masing mata pelajaran, sebagaimana amanat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang memayunginya. Dapat dipastikan bahwa pelaksanaan program PPK terintegrasi dengan seluruh atau masing-masing materi pembelajaran yang diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan program PPK di SMAN 1 diintergrasikan dengan beragam kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Ada sejumlah problem dalam pelaksanaan program PPK yang bisa terjadi di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa guru ada yang mengidentifikasi bahwa problem pelaksanaan program PPK lebih banyak dan dominan berasal dari kondisi dan lingkungan eksternal. Sehingga dapat ditegaskan bahwa terdapat sejumlah problem dalam pelaksanaan program PPK. Problem tersebut tampak berasal dari lingkungan tepat tinggal siswa, yakni dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat.

Beragam langkah dilakukan oleh pihak sekolah dalam memecahkan problem pelaksanaan program PPK. Di antaranya dengan menghadirkan langkah-langkah solutifnya.

Berdasarkan paparan data tersebut, peneitian ini menghasilkan temuan penelitian sebagai berikut (1) SMA Negeri 1 Pamekasan telah merencanakan secara matang dalam rangka pelaksanaan PPK, (2) Perencanaan dan pelaksanaan PPK dipandang sebagai bagian dari amanat pemerintah yang harus dilaksanakan secara institusional, (3) Pelaksanaan program/gerakan PPK pada sistem pesekolahan di SMA Negeri 1 Pamekasan dilakukan secara integratif dalam beragam kegiatan siswa di sekolah, yaitu pada kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler, (4) Pelaksanaan PPK pada kegiatan intrakurikuler mengambil bentuk integrasi dan interkoneksi di antara mata-mata

pelajaran yang memiliki keterkaitan erat dalam pembahasan dan tujuan pembelajarannya, (5) Pelaksanaan PPK pada kegiatan kokurikuler berbentuk penguatan praktikal dari penerapan muatan masing-masing matapelajaran, terutama dalam penguatan sikap dan keterampilan, (6) Pelaksanaan PPK pada kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam bentuk pengorganisasian aktivitas berdasarkan kesesuaian minat dan bakat siswa di luar kegiatan kelas, (7) Beragam problema pada pelaksanaan program PPK dalam pendidikan sistem persekolahan di SMA Negeri 1 Pamekasan ditemukan berdasarkan identifikasi masalahnya, yaitu problem internal dan eksternal sekolah. Selain itu, kesesuaian dan keselarasan antara muatan matapelajaran tertentu dan misi PPK juga berpotensi menjadi problem pelaksanaannya secara terpadu, (8) Sekolah telah mengambil langkah-langkah solutif dalam memecahkan problem pelaksanaan program PPK dalam pendidikan sistem persekolahan di SMA Negeri 1 Pamekasan, (9) Bentuk-bentuk langkah solutif tersebut di antaranya: menjalin komunikasi dengan *stakeholders* sekolah, orangtua/wali murid, hingga pembentukan paguyuban orangtua/wali murid, (10) Langkah solutif lainnya yang dilakukan oleh sekolah dalam bentuk penyadaran, pembinaan, dan koreksi atas perilaku siswa terutama yang terjadi di dalam lingkungan sekolah

Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) SMA Negeri 1 Pamekasan menampakkan kesiapan yang relatif matang dalam pelaksanaan PPK sebagai bagian dari amanat dari pemerintah yang harus dilaksanakan; (2) Pelaksanaan program/gerakan PPK pada sistem pesekolahan di SMA Negeri 1 Pamekasan dilakukan secara integratif dalam beragam kegiatan siswa di sekolah, yaitu pada kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler; (3) Beragam problema pada pelaksanaan program PPK dalam pendidikan sistem persekolahan di SMA Negeri 1 Pamekasan ditemukan berdasarkan identifikasi masalahnya, yaitu problem internal dan eksternal sekolah. Selain itu, kesesuaian dan keselarasan antara muatan matapelajaran tertentu dan misi PPK juga berpotensi menjadi problem pelaksanaannya secara terpadu, dan; (4) Sekolah telah mengambil langkah-langkah solutif dalam memecahkan problem pelaksanaan program PPK dalam pendidikan sistem persekolahan di SMA Negeri 1 Pamekasan. Bentuk-bentuk langkah tersebut di antaranya: menjalin komunikasi dengan *stakeholders* sekolah, orangtua/wali murid, hingga pembentukan paguyuban orangtua/wali murid. Langkah solutif lainnya dilakukan oleh sekolah dalam bentuk penyadaran, pembinaan, dan koreksi atas perilaku siswa terutama yang terjadi di dalam lingkungan sekolah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyampaikan saran terutama kepada: (1) *Stakeholders* pendidikan dalam semua level agar mengembangkan *platform* pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan, dengan memperhatikan kondisi keberagaman satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia; (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi Jawa Timur agar menginisiasi untuk membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad XXI; (3) Kepala SMA Negeri dalam wilayah Jawa Timur agar mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan pondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik) dalam penyelenggaraan sistem persekolahan; (4) Para Guru matapelajaran di SMA Negeri se-Jawa Timur agar merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter; (5) Pemerhati dan praktisi bidang pendidikan agar membangun jejaring pelibatan publik sebagai sumber-sumber belajar di

dalam dan di luar sekolah; dan, (6) Warga dan komunitas pendidikan agar melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1992.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S., *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 1994.
- Dimiyati, M., *Penelitian Kualitatif: Paradigma, Epistemologi, Pendekatan, Metode, dan Penerapannya*. Malang: IPTI dan PPS UM, 2000.
- Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. *Toward a Methodology of Naturalistic Inquiry in Education*. Los Angeles: Center for Study of Evaluation University of California, 1995.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G., *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications, Inc., 1995, 15;
- Patton, M.Q., *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills, California: Sage Publications, Inc., 1994.
- Kerlinger, F. N., *Foundation of Behavioral Research*, Seventh Edition. New York: Holt Rinehart and Winston, Inc., 2006.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1999), 44.
- Lofland, J. & lofland, L.H. *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont, C.A.: Wadsworth Publishing, Co., 1994.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication, 1996, 65; Bogdan & Biklen.
- Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Jakarta: Setjen Kemdikbud, 2017.
- PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*, Pasal 1. Lembaran Negara RI tahun 2017 Nomor 195.
- PP Nomor 19 Tahun 2005, *Juncto* PP Nomor 32 Tahun 2013, dan *Juncto* PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Program kerja Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2014.
- Spradley, J.P., *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1990.
- Soetopo, H.B. *Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Makalah Kuliah Umum Tidak dipublikasikan. Malang: Pusat Penelitian IKIP MALANG, 4 Februari, 1997.
- Sonhadji K.H., A., Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, dalam Imron Arifin (Ed.). *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press, 1994.
- Soegianto, S., *Desain dalam Penelitian Kualitatif*. Makalah Disampaikan pada Penataran Dosen IKIP Surabaya. Makalah Tidak dipublikasikan. Surabaya: Pusat Penelitian IKIP Surabaya, 20 Januari, 1999.
- UNESCO, *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* (Paris: UNESCO Publishing, 2015), 17.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2003.